

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka  
(TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

Nama : Hanny Widayanti  
Nomor Mahasiswa : 17313090  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**2021**

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka  
(TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Hanny Widayanti  
Nomor Mahasiswa : 17313090  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN**

**2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2021

Penulis,



Hanny Widayanti

## PENGESAHAN

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019

Nama : Hanny Widayanti  
Nomor Mahasiswa : 1713090  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 12 Maret 2021

telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,

  
12 Maret 2021

Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec. Dev

## PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diuji dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Nama : Hanny Widayanti  
Nomor Mahasiswa : 17313090  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, .....

Disahkan oleh,

Pembimbing skripsi : Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec. Dev

Penguji :

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana SE., MSi., Ph.D

## HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al Baqarah: 286)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk sebuah persembahan atas rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:  
Diri saya sendiri yang sudah berusaha, berproses, dan berprogress hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Adapun judul dari skripsi ini adalah, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa ada dukungan dari beberapa pihak maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam membantu proses pengerjaan skripsi adalah:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan, kekuatan, dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu saya yang selama ini memberikan yang terbaik untuk saya. Dari support secara moral maupun finansial. Terima kasih atas do'a yang selalu Ibu panjatkan untuk penulis.
3. Bapak Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec. Dev selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan sarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah bapak berikan.
4. Bapak Fathul Wahid. S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.



5. Bapak Prof. Jaka Sriyana SE., MSi., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis sangat bersyukur dapat berprogress bersama kalian. Terima kasih atas segala dukungan teman-teman kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi 2017 yang sudah berjuang bersama-sama hingga mencapai di titik ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kalian semua, diberi limpahan berkah, dan kebahagiaan oleh Allah SWT atas kebaikan hatinya telah membantu penulis dalam segala hal.

Akhir kata, penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap para pembaca dapat memberi kritik dan saran sebagai bahan evaluasi penulis. Tidak lupa penulis berharap bahwasemoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 11 Maret 2020

Penulis,



Hanny Widayanti

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	iii
PENGESAHAN UJIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	6
2.1 Kajian Pustaka .....	6
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Pengangguran .....	11
2.2.2 Penanaman Modal Asing (PMA) .....	17
2.2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	19
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	20
2.2.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) .....	23
2.3 Kerangka Pemikiran .....	23

2.4 Hipotesis Penelitian .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Model Penelitian.....	27
3.2 Metode Penelitian .....	27
3.3 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	28
3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian.....	28
3.4.1 Variabel Dependen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai Y .....	28
3.4.2 Variabel Independen (X).....	28
3.5 Metode Analisis Data .....	30
3.6 Teknik Analisis.....	31
3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	31
3.6.2 Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji f).....	31
3.6.3 Estimasi Fixed Effect Model (FEM) .....	31
3.6.4 Estimasi Random Effect Model (REM).....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Hasil Pengolahan Data.....	33
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.3 Hasil Analisis.....	39
4.3.1 Pemilihan Model Data Panel.....	39
4.3.2 Estimasi Random Effect Model (REM).....	42
4.3.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	44
4.3.3 Uji F.....	44
4.3.4 Uji T.....	45
4.4 Interpretasi Hasil.....	46

4.5 Analisis Ekonomi .....	47
4.5.1 Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	47
4.5.2 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	48
4.5.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap (IPM) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	48
4.5.4 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	49
BAB V PENUTUP .....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
REFERENSI .....	53
LAMPIRAN.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....25



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengangguran Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019 (dalam persen) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.2 Data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi (dalam persen).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.3 Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat (triliun)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (triliun) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.2 Hasil Regresi Uji Chow .....	40
Tabel 4.3 Hasil Regresi Lagrange Multiplier Test .....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman.....	42
Tabel 4.5 Hasil Model Fixed Effect Model (FEM) .....	42

## ABSTRAK

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang kompleks, karena pengangguran bukan hanya sekadar ketidakmampuan untuk bekerja tetapi juga kegagalan dalam meningkatkan kualitas diri. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Padahal, penerimaan investasi baik dari asing maupun dalam negeri dinilai cukup tinggi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan data time series dan menggunakan regresi panel sebagai alat estimasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PMA, PMDN, dan IPM berpengaruh positif terhadap TPT. Sedangkan variabel UMK berpengaruh negatif terhadap TPT.

**Kata Kunci: PMA, PMDN, IPM, UMK, dan TPT.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 49,94 juta. Perekonomian Jawa Barat pada triwulan 1 2020 tumbuh sebesar 2,73% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2019 yang mencapai 4,11% (yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) menyebutkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 24,33 juta orang di mana mengalami kenaikan sebesar 500 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2019. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,27%. Meningkatnya jumlah angkatan kerja diharapkan mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan yang masih terjadi di Jawa Barat. Seperti pengangguran, terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, jaminan sosial yang rendah, gaji pekerja yang rendah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

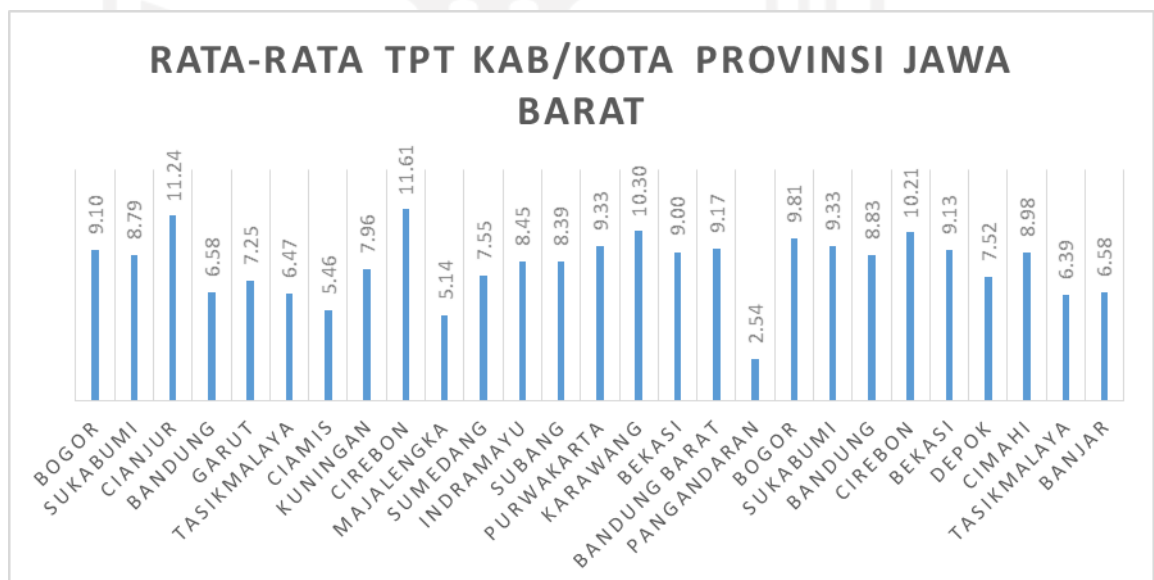
Dari beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Jawa Barat, pengangguran masih menjadi masalah ketenagakerjaan yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang paling tinggi di Indonesia. Menurut BPS, TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Umumnya, TPT digunakan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan atau memilih untuk tidak bekerja. Menurut Sadono (2005) dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartanto & Masjkuri (2017),



pengangguran termasuk masalah yang memiliki dampak buruk bagi perekonomian, individu, dan masyarakat. Seperti, tidak maksimalnya kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas masyarakat menurun, dan pendapatan masyarakat akan ikut menurun sehingga akan menimbulkan masalah baru, yaitu kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, dan masalah sosial lainnya.

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Seperti, ketidakseimbangan antara penawaran lapangan pekerjaan dengan permintaan lapangan pekerjaan, ketidaksiapan seseorang untuk memasuki dunia kerja, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, kemajuan teknologi, minimnya keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, adanya gejolak ekonomi, seorang individu yang tidak memiliki minat dengan suatu bidang pekerjaan, dan lain-lain

**Grafik 1.1 Rata-rata TPT**



Berdasarkan latar belakang dan variabel bebas yang telah ditulis, peneliti akan menganalisa sejauh mana pengaruh dari PMA, PMDN, IPM, dan UMP

dalam memengaruhi TPT di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2019. di mana penelitian ini berjudul, “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan aliran investasi yang cukup tinggi. Selama lima tahun terakhir penerimaan investasi di Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Disisi lain, tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat juga tinggi. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat menduduki urutan dua tertinggi setelah Kepulauan Riau dan berikutnya ada DKI Jakarta pada urutan tiga. Semestinya apabila suatu daerah mendapatkan aliran investasi yang tinggi mampu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena aliran investasi mampu dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber manusia, untuk membeli berbagai peralatan pabrik, dan hal-hal lain yang mampu mendorong kinerja suatu perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini menarik karena apakah dengan tingginya aliran dana investasi berpengaruh pada tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh PMA terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh UMP terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh PMA terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh PMDN terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh UMP terhadap TPT di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi dan praktisi ekonomi, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi TPT, khususnya di kab/kota Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan kebijakan dan strategi yang

akan dicapai untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di kab/kota Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah penelitian mengenai masalah ketenagakerjaan dan atau sebagai pendukung bahan penelitian yang akan dilakukan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Berdasarkan pencarian penelitian terdahulu, penelitian dengan judul serupa seperti, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2019 masih belum banyak dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Sepanjang melakukan pencarian, kemiskinan merupakan penelitian yang cukup banyak dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan judul penelitian yang cukup sering dilakukan; Analisis Determinan di Provinsi Jawa Barat, Analisis Faktor Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Tahun 2011-2014, dan penelitian lainnya. Sebagiannya lagi, penelitian dengan judul serupa dilakukan di wilayah lain seperti di Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian ini salah satunya guna memperkaya referensi penelitian dengan judul serupa. Dibawah ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian ini.

R. Helvira dan P. Rizki (2020) dengan studi penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data time series dan cross section. Metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa investasi, upah minimum, dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di 14 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Hartanto & Masjkuri (2017) dengan studi penelitiannya yang berjudul, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel, yaitu gabungan data time series dan cross section. Metode yang digunakan sebagai metode estimasi adalah metode Random Effect. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk, pendidikan, dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Sedangkan upah minimum secara parsial tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur.

Mahroji & Nurkhasanah (2019) dengan studi penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah terdiri dari IPM, UMK, dan investasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode data panel dengan cara menggabungkan data runtun waktu dengan data silang serta model penelitian ini menggunakan Chow Test dan Hausman Test. Berdasarkan hasil regresi yang telah di uji dengan menggunakan Fixed Effect Model menunjukkan hasil bahwa IPM, UMK, dan investasi berpengaruh signifikan serta berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Hal ini berarti bahwa apabila IPM, UMK, dan investasi meningkat maka tingkat pengangguran di Provinsi Banten akan menurun, begitupun sebaliknya.

Nurhidayah (2018) dengan studi penelitiannya yang berjudul, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016”. Dalam penelitian ini tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen. Jenis data yang

digunakan adalah data time series dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda berbasis Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007-2016. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pergerakan tingkat pengangguran terbuka.

Elvana dan Soeharjoto (2020) dengan studi penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, IPM, PMA, dan PMDN Tingkat Pengangguran di Indonesia”. Penelitian ini diteliti dilakukan menggunakan regresi dengan data panel. Dalam penelitian ini, inflasi, jumlah penduduk, IPM, PMA, dan PMDN sebagai variabel bebas. Sedangkan pengangguran sebagai variabel terikat. Hasil dari penelitian ini adalah inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah penduduk dalam jumlah banyak namun didominasi oleh balita dan remaja. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Adanya IPM dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga masyarakat dapat menyerap kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria perusahaan dan berakibat pada turunnya jumlah pengangguran. PMDN tidak berpengaruh terhadap pengangguran, hal ini terjadi karena PMDN di Indonesia lebih banyak dilakukan di sektor modal sehingga tidak memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Terakhir, PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, hal ini terjadi karena PMA di Indonesia lebih banyak dilakukan di sektor padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Masjkuri (2017) merupakan penelitian yang paling banyak memiliki persamaan dengan penelitian ini. Beberapa persamaan penelitiannya adalah variabel upah minimum dan pendidikan (bagian dari indeks pembangunan manusia), model penelitian yang dipilih yaitu random effect model, dan menggunakan data time series. Namun penulis melakukan beberapa perkembangan penelitian. Seperti menambahkan variabel independen (PMA dan PMDN), wilayah pengamatan yang mana dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, dan periode penelitian yang lebih lama dari tahun 2012 sampai tahun 2019.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh Hartanto dan Masjkuri (2017) adalah variabel tingkat pendidikan yang diprosikan dengan rata-rata lama sekolah (salah satu komponen IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Kondisi ini terjadi di Provinsi Jawa Timur karena secara umum pertumbuhan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan capaian peningkatan rata-rata lama sekolah yang mana masih tergolong rendah di angka 7,4 tahun atau setara dengan pendidikan SMP.

Capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sampai pada tingkat SMP tentu akan sulit untuk memasuki dunia kerja yang membutuhkan pekerja dengan persyaratan rata-rata lama sekolah minimal 12 tahun atau lebih. Tentu saja hal ini akan menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Edy (2009) di Provinsi Jawa Tengah dan Suaidah dan Cahyono (2013) yang mendapatkan kesimpulan bahwa pendidikan memiliki hubungan positif dengan pengangguran. Menurut penelitian yang telah dilakukan, hal ini terjadi karena seseorang yang memiliki rata-rata lama sekolah



lebih tinggi akan lebih selektif untuk memiliki pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang tersebut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan Dengan Penulis
1	Reni Helvira dan Endah Putria Rizki (2020), Indonesia	Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat	Periode pengamatan dan wilayah pengamatan.
2	Hartanto & Masjkuri (2017), Indonesia	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014	Periode pengamatan, wilayah pengamatan, dan variabel bebas.
3	Mahroji & Nurkhasanah, (2019), Indonesia	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten	Periode pengamatan, lingkup wilayah pengamatan, dan variabel bebas.
4	Nurhidayah (2018), Indonesia	Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016	Periode penelitian, lingkup wilayah penelitian, dan metode analisis data.
5	Elvana Astrid dan Soeharjoto Soekapdjo (2020), Indonesia	Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, IPM, PMA, dan PMDN Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia	Periode penelitian dan lingkup wilayah penelitian.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengangguran**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pengangguran**

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang belum memiliki pekerjaan, tidak mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, dan atau sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Namun, tidak semua penduduk usia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Penduduk yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang sedang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Sehingga apabila terdapat orang yang berusia 20 tahun tetapi tidak bekerja karena sedang menempuh pendidikan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Hal ini terjadi karena waktu yang seharusnya ia lakukan untuk bekerja digunakan untuk menempuh pendidikan, seperti kuliah atau pelatihan.

Menurut Sukirno (1994) dalam penelitian yang dilakukan oleh Alghofari, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan, tetapi belum mendapatkannya. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang memengaruhi segala aspek yang terlibat. Tidak hanya itu, pengangguran merupakan masalah kompleks, karena pengangguran bukan hanya sekadar ketidakmampuan seseorang untuk bekerja, tetapi juga kegagalan dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Karena, bagi sebagian orang menganggur itu secara tidak langsung menurunkan suatu standar kehidupan di masyarakat. Hal ini bukan menjadi hal baru jika sampai sekarang pengangguran masih menjadi topik yang sering dibahas oleh politisi dalam perdebatan politik. Sebagian politisi menggunakan permasalahan pengangguran sebagai ajang kampanye dengan cara menawarkan berbagai kebijakan yang akan dilakukan untuk menangani masalah pengangguran.

Menurut Kaufman & Hotchkiss (2000) dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Siti, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi tetap berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, menurut Muhdar (2015), dalam penelitian yang dilakukan oleh Basrowi dkk, pengangguran merupakan seseorang yang tergolong pada usia kerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu namun belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam usia kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan sesuai tingkat upah yang diinginkan. Namun, mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mendapatkan pekerjaan selama kurun waktu empat minggu.

#### **2.2.1.2 Jenis-jenis Pengangguran**

Menurut Sadono (2005), terdapat dua cara untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab dan ciri-cirinya. Berikut merupakan jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran friksional, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh seseorang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran siklikal, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh merosotnya aktivitas ekonomi atau karena permintaan agregat yang terlalu kecil di dalam perekonomian suatu negara.
3. Pengangguran struktural, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.
4. Pengangguran teknologi, yaitu jenis pengangguran yang disebabkan oleh adanya pergantian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan teknologi di dalam proses produksi suatu komoditas.

Selanjutnya, berikut merupakan jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya:

1. Pengangguran terbuka, yaitu jenis pengangguran yang tercipta sebagai akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi, yaitu jenis pengangguran yang tercipta sebagai akibat jumlah pekerja dalam suatu pekerjaan lebih banyak dari jumlah pekerja yang sebenarnya diperlukan.
3. Pengangguran musiman, yaitu jenis pengangguran yang tercipta sebagai akibat perubahan musim yang terjadi. Biasanya pengangguran ini terjadi di sektor perikanan dan pertanian.
4. Setengah menganggur, yaitu jenis pengangguran yang tercipta sebagai akibat dari pekerja tidak penuh waktu atau bahkan lebih rendah dari waktu normal bekerja.

#### **2.2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran**

Menurut Muhdar (2015), berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran:

1. Besarnya jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan. Yang selalu terjadi adalah jumlah angkatan kerja lebih besar dari lapangan pekerjaan yang ditawarkan.
2. Kebutuhan antara jumlah tenaga terdidik, jenis tenaga terdidik, dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila lapangan pekerjaan yang disediakan sama dengan jumlah angkatan kerja belum tentu semua angkatan kerja terserap. Hal ini terjadi karena belum tentu terdapat kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakesesuaian ini berakibat pada sebagian tenaga kerja tidak dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia.

3. Ketidakseimbangan antara penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah satu dengan daerah lainnya. Seperti, jumlah angkatan kerja di daerah A lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah B jumlah kesempatan kerja lebih besar dari angkatan kerja. Keadaan seperti ini dapat berakibat pada perpindahan tenaga kerja dari daerah satu ke daerah lainnya.

Menurut Subri (2003), penyebab dari pengangguran adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Karena setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah angkatan kerja dari lulusan sekolah maupun perguruan tinggi, di mana penawaran tenaga kerja cenderung tidak bertambah. Selanjutnya, menurut Putro & Setiawan (2013), mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi karena akibat adanya tingginya perubahan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan. Sehingga, mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang relatif kecil.

#### **2.2.1.4 Dampak Pengangguran Terhadap Individu dan Perekonomian**

Pengangguran tentunya memiliki dampak negatif bagi individu maupun perekonomian. Berikut merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya:

1. Pengangguran dapat menurunkan kualitas hidup seseorang.
2. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian seseorang.
3. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dapat terjadi karena keterampilan yang dimiliki belum dan atau digunakan kembali.
4. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan politik.

Selain dapat berdampak negatif terhadap individu, pengangguran juga berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Berikut merupakan dampak negatif pengangguran terhadap perekonomian suatu negara:

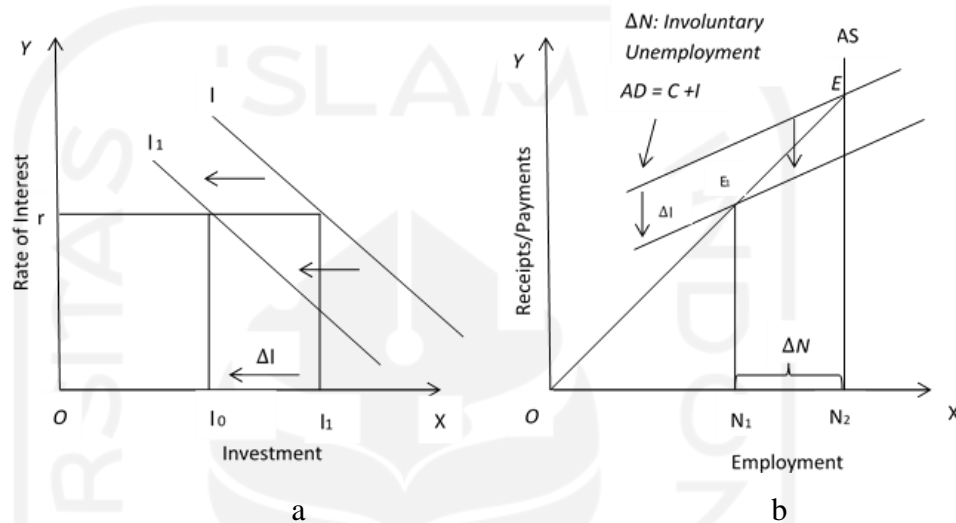
1. Pengangguran dapat mengakibatkan masyarakat tidak maksimal dalam mencapai tingkat kesejahteraan. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil yang dicapai masyarakat menurun dibandingkan dengan pendapatan nasional riil yang seharusnya dicapai. Maka dari itu, kesejahteraan yang dicapai masyarakat menjadi lebih rendah.
2. Pengangguran akan berakibat pada turunnya pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan perekonomian suatu negara menurun sehingga pendapatan masyarakat akan ikut menurun. Ketika pendapatan masyarakat menurun maka pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat akan ikut menurun. Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan masalah baru yaitu kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah akan bergerak lambat karena penerimaan pajak menurun.
3. Pengangguran akan melambatkan pergerakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya pengangguran akan berakibat pada turunnya daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap komoditas hasil produksi akan berkurang. Keadaan ini menjadikan investor atau pengusaha untuk tidak melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi dalam suatu negara akan menurun sehingga akan melambatkan pergerakan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.2.1.5 Teori Pengangguran yang Berhubungan dengan Penanaman Modal**

Menurut Keynes dalam *Keynes Theory of Employment* salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di negara kapitalis industri adalah adanya penurunan dalam investasi swasta. Penurunan ini terjadi karena adanya ekspektasi bisnis yang merugikan, pesimisme yang merajalela di kalangan investor, dan turunnya efisiensi marjinal modal (tingkat pengembalian yang

diharapkan) yang menyebabkan ketidakseimbangan kesempatan kerja. Akibatnya, lapangan kerja turun drastis dan pengangguran terjadi dalam skala besar.

Grafik 2.1



Bagaimana penurunan investasi dapat menyebabkan penurunan tingkat output, kesempatan kerja, dan tingginya pengangguran dapat di ilustrasikan pada gambar 2.1. Dari gambar 2.1 (a) terlihat bahwa akibat ekspektasi keuntungan atau pesimisme investor yang merugikan, kurva permintaan bergeser ke kiri dari  $I$  ke  $I_1$  pada tingkat bunga tertentu. Penurunan permintaan investasi sebesar  $I$  menyebabkan pergeseran ke bawah dalam kurva permintaan agregat dari  $AD$  ke  $AD'$  pada gambar 2.1 (b).

Akibatnya, keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat yang awalnya pada tingkat kesempatan kerja penuh (sesuai dengan titik  $E$  di mana dua kurva berpotongan) jatuh ke tingkat ekuilibrium. Oleh karena itu, penyebab pengangguran menurut Keynes adalah kekurangan permintaan agregat.

## **2.2.2 Penanaman Modal Asing (PMA)**

### **2.2.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing kepada negara Indonesia, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Salim & Sutrisno (2008), Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Biasanya, persentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal sebesar 95%. Sedangkan persentase saham penanam modal dalam negeri minimal sebesar 5%.

Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam (Arifin dkk, 2008), Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan investasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan di dalam suatu negara terhadap perusahaan di negara lain sebagai pemenuhan pengelolaan operasional perusahaan di negara tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PMA adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing (baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah) untuk keberlangsungan usaha di suatu negara tujuan investasi.

Hubungan PMA dengan TPT adalah negatif. Hal ini terjadi karena dasarnya investasi yang dilakukan oleh asing tentu akan memberikan suntikan dana sebagai modal kepada daerah penerima investasi yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pembangunan ekonomi adalah dibangunnya proyek-proyek baru sehingga



mampu menyerap tenaga kerja yang sedang mengganggu di suatu daerah. Karena semakin tinggi nilai investasi yang dikeluarkan maka akan menurunkan jumlah pengangguran pada suatu kabupaten/kota, begitupun sebaliknya. Apabila semakin rendah nilai investasi yang dikeluarkan maka akan meningkatkan jumlah pengangguran pada suatu kabupaten/kota.

#### **2.2.2.2 Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing**

##### **1. Joint Venture**

Joint venture merupakan kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal dalam negeri berdasarkan suatu perjanjian. Misalnya, bentuk kerja sama antara suatu perusahaan minyak di negara Brunei Darussalam dengan perusahaan minyak di Kalimantan Barat untuk mengolah minyak kelapa sawit secara bersama-sama.

##### **2. Joint Enterprise**

Joint Enterprise merupakan kerja sama antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri dengan cara membentuk suatu perusahaan. Joint Enterprise merupakan suatu perusahaan yang memiliki batasan. Dalam perusahaan ini modal yang digunakan adalah modal dalam rupiah dan dalam valuta asing.

##### **3. Kontrak Karya**

Kontrak karya merupakan kerja sama yang terjadi antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri, apabila investor asing membentuk suatu badan hukum di Indonesia, di mana badan hukum yang dibentuk mengadakan kerja sama dengan badan hukum lainnya yang menggunakan modal dalam negeri.

### **2.2.2.3 Manfaat Penanaman Modal Asing (PMA)**

Terdapat tujuh manfaat melakukan penanaman modal asing di suatu negara. Berikut merupakan tujuh manfaat penanaman modal asing yang dikemukakan oleh Head (1993):

1. Menciptakan lowongan kerja baru bagi penduduk suatu negara yang menjadi tempat investasi. Sehingga, penduduk suatu negara tersebut dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
2. Menciptakan kesempatan baru bagi penduduk negara tujuan investasi. Karena mereka dapat berbagi keuntungan dari pendapatan perusahaan-perusahaan yang baru terbentuk.
3. Meningkatkan ekspor bagi negara tujuan investasi. Hal ini terjadi karena suatu negara mendapatkan modal asing untuk memutar kembali uang tersebut menjadi bentuk barang yang bisa di ekspor di negara lain.
4. Memberikan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan dari industri lain.
5. Memperluas potensi komoditas swasembada yang dapat dijadikan sebagai pengganti barang impor.
6. Menambah penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk keperluan pembangunan negara tujuan investasi.
7. Menjadikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tujuan investasi agar pemanfaatan kedua sumber daya tersebut optimal.

### **2.2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

#### **2.2.3.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan untuk membuka usaha maupun melakukan

ekspansi usaha di Negara Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. Sama seperti PMA, PMDN juga memiliki hubungan negatif dengan TPT. Hal ini terjadi karena derasnya investasi yang dilakukan dari dalam negeri akan memberikan suntikan modal kepada daerah penerima investasi untuk melakukan pembangunan ekonomi dalam bentuk pembangunan proyek sehingga dapat memicu turunnya TPT. Karena semakin tinggi nilai investasi yang dikeluarkan maka akan menurunkan jumlah pengangguran pada suatu kabupaten/kota.

Pihak-pihak yang dapat menjadi investor penanaman modal dalam negeri menurut UU Nomor 25 Tahun tentang Penanaman Modal adalah perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Sedangkan pihak-pihak yang dapat melakukan pengajuan penanaman modal dalam negeri kepada investor adalah perorangan, koperasi, BUMD, BUMN, dan lain-lain.

#### **2.2.3.2 Manfaat Penanaman Modal Asing**

1. Mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Karena mampu membiayai kebutuhan aliran dana untuk daerah yang ada pada negara itu sendiri.
2. Mampu mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui pembiayaan dalam negeri.
3. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja pada daerah yang menjadi tujuan investasi.

#### **2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

##### **2.2.4.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pada tahun 1990, IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan di publikasikan secara berkala oleh Human Development Report (HDR) dalam laporan tahunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk di suatu negara. Sedangkan, IPM merupakan indeks untuk mengukur

seberapa tercapainya pembangunan manusia melalui pendekatan berbasis kualitas hidup. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu lama hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf bagi penduduk usia 15 tahun ke atas.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menjelaskan perihal bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti dalam memperoleh pendapatan, akses kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. Indikator yang digunakan untuk menghitung IPM adalah gabungan antara angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa IPM merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara dengan menggunakan beberapa indikator sesuai dengan negara masing-masing.

#### **2.2.4.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tiga manfaat dari IPM. Berikut merupakan manfaat IPM menurut BPS:

1. Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Sebagai penentu peringkat pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data yang strategis. Karena selain menjadi salah satu alokator penetapan Dana Alokasi Umum (DAU), IPM juga digunakan sebagai ukuran kinerja Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya menurut Soleha (2016), manfaat IPM adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesadaran bagi para pengambil kebijakan agar lebih fokus pada tujuan pembangunan manusia. Karena IPM diperkenalkan

untuk menjadi hal paling utama dalam pembangunan suatu negara, bukan pertumbuhan ekonomi ataupun yang lainnya.

2. Mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Misalnya, bagaimana dua negara dengan tingkat pendapat perkapita yang sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
3. Menunjukkan perbedaan di antara daerah satu dengan daerah lainnya (baik lingkup negara maupun lingkup dunia). Hal ini dilakukan dengan menunjukkan ketimpangan yang terjadi di antara kelompok-kelompok tertentu, setelahnya dapat dilakukan diskusi di berbagai daerah dan mencari sumber masalah beserta solusi untuk menyelesaikan masalah ketimpangan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas mengenai manfaat IPM, dapat disimpulkan bahwa manfaat IPM adalah sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tidak hanya itu, IPM juga bermanfaat untuk para pemangku kebijakan karena dengan adanya IPM dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil langkah kebijakan dalam menangani masalah pembangunan manusia.

IPM memiliki beberapa indikator sebagai pembentuk indeks itu sendiri, yaitu: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan harapan lama sekolah. Apabila semakin tinggi IPM maka akan menurunkan tingkat pengangguran, begitupun sebaliknya. Apabila semakin rendah IPM maka akan meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi karena tingginya IPM menjadi representasi tingginya value atau kualitas diri yang dimiliki oleh tiap individu yang tinggal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

## **2.2.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

### **2.2.5.1 Pengertian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

Berdasarkan yang telah diatur dalam PP NO.8/2981 upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, baik sektoral regional maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum merupakan upah pokok dan tunjangan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

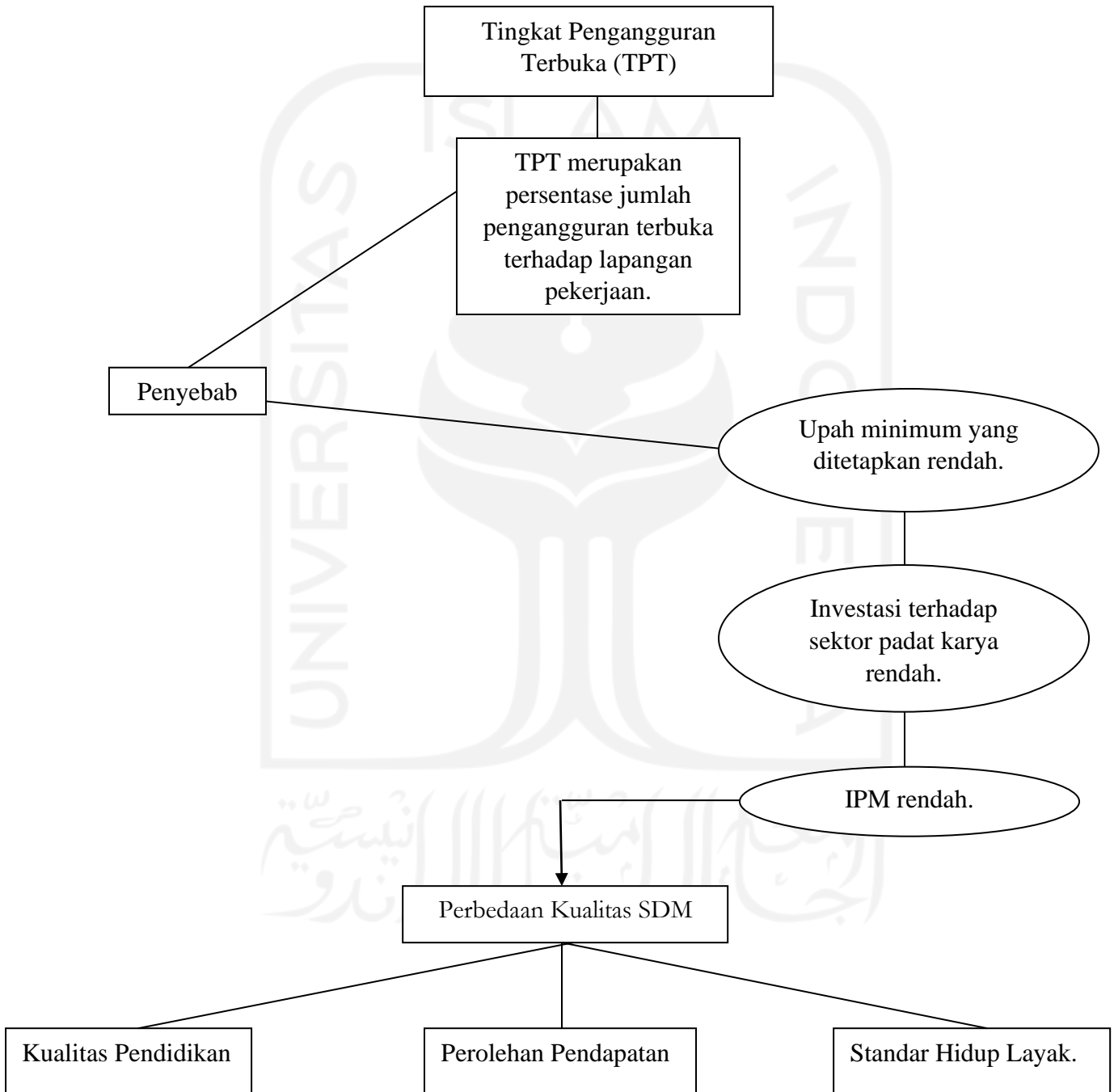
Dari dua pengertian upah di atas, dapat disimpulkan bahwa UMK merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) wilayah setempat di mana berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota. UMK memiliki hubungan yang negatif dengan TPT. Hal ini terjadi karena penetapan upah yang dilakukan pada suatu kabupaten/kota akan memberikan dampak terhadap besarnya tingkat pengangguran. Apabila UMK di suatu daerah rendah bahkan *underpaid* maka seseorang akan memilih untuk tidak bekerja atau memilih bekerja di daerah lain dengan UMK yang tinggi. Karena apa yang sudah dikeluarkan (waktu, pikiran, dan tenaga) tidak mendapatkan *feedback* yang semestinya, begitupun sebaliknya. Apabila UMK di suatu daerah tinggi maka seseorang akan memilih bekerja di daerah tersebut dan mampu menurunkan tingkat pengangguran. Dalam hal ini lah bagaimana UMK dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan terhadap empat variabel yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan variabel independen. Sedangkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan variabel dependen. Variabel-variabel tersebut akan dilakukan regresi untuk dapat menghasilkan tingkat signifikansinya dalam memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Regresi dilakukan untuk menggambarkan kepada pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang menyebabkan pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang digunakan sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara skema, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran





## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang ditulis. Maka dari itu perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengujian yang sebelumnya telah didapatkan data penelitiannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki hubungan yang negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan yang negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
3. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki hubungan yang negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Model Penelitian

$$Y = \beta_0 + \beta_1 PMA_{it} + \beta_2 PMDN_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y	= Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
PMA	= Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (persen)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (juta rupiah)
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Parameter
$\varepsilon$	= Error Term
i	= Indikator daerah
t	= Indikator waktu

Pada saat melakukan melakukan perhitungan menggunakan eviews tidak dilakukan log pada data penelitian.

#### 3.2 Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata Metode yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan Logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya adalah catatan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara logis untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Sedangkan, penelitian artinya adalah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hasil penelitian hingga menyusun laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian dengan menggunakan angka baik dari pengumpulan data sampai pada pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **3.3 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berdasarkan runtut waktu (time series) tahunan, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2019 yang telah diperoleh dari berbagai sumber terkait. Beberapa sumber data penelitian ini didapatkan dari: Badan Pusat Statistik (BPS), Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, dan Badan Koordinasi Pemilik Modal (BKPM).

### **3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian**

Menurut Tarsito (2014), operasional variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga memperoleh data dan informasi mengenai penelitian tersebut dan didapatkan hasil penelitiannya.

#### **3.4.1 Variabel Dependen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai Y**

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi dan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Dalam penelitian ini TPT dinotasikan sebagai Y dalam satuan persen.

#### **3.4.2 Variabel Independen (X)**

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel lainnya dan variabel yang menjadi penyebab adanya timbulnya perubahan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

### 1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing (baik perorangan, perusahaan, maupun pemerintah) untuk keberlangsungan usaha di suatu negara tujuan investasi. Data PMA yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Data PMA didapatkan dari website [nswi.bkpm.go.id](http://nswi.bkpm.go.id). Dalam penelitian ini, PMA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dinotasikan dengan X1 dalam satuan triliun rupiah.

### 2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan penanaman modal yang digunakan untuk membuka usaha maupun melakukan perluasan usaha di Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. Data PMDN yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Data PMA didapatkan dari website [nswi.bkpm.go.id](http://nswi.bkpm.go.id). Dalam penelitian ini, PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dinotasikan dengan X2 dalam satuan triliun rupiah.

### 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara dengan menggunakan beberapa indikator sesuai dengan negara masing-masing. Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Data IPM didapatkan dari website [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id). Dalam penelitian ini IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dinotasikan dengan X3 dalam persen.

#### 4. Upah Menengah Kabupaten/Kota (UMK)

UMK merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) setempat di mana berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota. Data UMK yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2019. Data UMK didapatkan dari web [disnakertrans.jabar.go.id](http://disnakertrans.jabar.go.id), namun untuk data pada tahun 2016 diperoleh dari perhitungan  $\frac{UMK\ 2015 + UMK\ 2017}{2}$ , karena data pada tahun 2016 tidak terdapat pada sumber manapun. Dalam penelitian ini UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dinotasikan dengan  $X_4$  dalam juta rupiah.

### 3.5 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode panel untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Data time series yang digunakan dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Sedangkan data cross section yang digunakan yaitu 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang diambil bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, dan Badan Koordinasi Pemilik Modal (BKPM). Metode yang dipilih sebagai metode estimasi adalah Random Effect Model. Uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari model yang diestimasi adalah dengan melakukan uji t-statistik dan uji f-statistik.

### 3.6 Teknik Analisis

#### 3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas secara individu dalam memengaruhi variasi dari variabel terikat.

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dari hasil regresi dengan nilai keyakinan ( $\alpha = 5\%$  atau 0,05). Apabila didapatkan nilai p value  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.6.2 Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji f)

Uji f dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidaknya suatu variabel independen secara bersama-sama dalam memengaruhi variabel dependen.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_a : \text{paling tidak ada salah satu parameter } (\beta) \text{ yang tidak sama dengan nol}$$

Apabila didapatkan nilai probabilitas atau p-value  $f < \alpha$  ( $\alpha = 5\%$  atau 0,05), maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen pada persamaan tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap variasi pada variabel dependen. Sedangkan, apabila  $f > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

#### 3.6.3 Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan salah satu bagian dari model panel yang menggunakan variabel dummy dalam teknik estimasi data panel. Estimasi ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan intercept. Model data panel untuk regresi FEM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

### 3.6.4 Estimasi Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) merupakan teknis estimasi data panel yang memperhitungkan adanya variabel gangguan (error) yang saling berhubungan baik antar waktu maupun antara individu yang tercermin dari intercept yang diakomodasi melalui error yang mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series. Model data panel untuk regresi REM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it} + \varepsilon_i$$



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Daerah Penelitian**

Berdasarkan data PMA dan PMDN yang disilangkan dengan pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan pengangguran terbuka tinggi sebagaimana terjadi di Kota Cirebon. Namun ketika investasi tinggi, pengangguran terbuka juga tinggi sebagaimana terjadi di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, hal itu menarik untuk diteliti.

TPT di Provinsi Jawa Barat mengalami pergerakan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari perubahan TPT setiap tahunnya. Pada tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 0,16% dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini terjadi karena adanya penurunan TPAK di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014, TPT mengalami penurunan sebesar 0,71% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini terjadi karena jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan hingga mencapai 125,3 juta orang, di mana pada tahun sebelumnya jumlah angkatan kerja sebesar 120,1 juta orang. Selain itu, di beberapa sektor terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja. Terutama di sektor jasa kemasyarakatan, sektor perdagangan, dan sektor industri (BPS, 2014). Pada tahun 2015, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,27% dibandingkan dengan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019, TPT terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penduduk yang bekerja dan pada beberapa sektor mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Terutama peningkatan pada sektor informal, sektor, perdagangan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Jika dilihat dari sektor pendidikan, hingga pada tahun 2019 lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran sebesar 14,53% dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.



Berikut ini merupakan klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan persentase tingkat pengangguran tertinggi. Kabupaten/Kota dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Cirebon (10,3%), Cianjur (9,98%), Purwakarta (9,69%), Kota Bogor (9,69%), dan Kabupaten Bogor (9,53%).

Berdasarkan portal berita Radar Cirebon, tingginya pengangguran di Cirebon disebabkan oleh terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tingginya penambahan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya dan daya serap tenaga kerja menurun. Tidak hanya itu, lapangan pekerjaan yang menyediakan keahlian tertentu jarang ditawarkan bahkan seringkali tidak ada. Sehingga lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMK dengan keahlian tertentu sulit terserap di pasar tenaga kerja. Namun, untuk mengatasi masalah ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon telah mengusahakan berbagai cara untuk menekan tingginya pengangguran. Seperti, meningkatkan keterampilan khusus untuk calon tenaga kerja melalui berbagai pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), menggelar *job fair*, dan mengadakan kegiatan magang di perusahaan-perusahaan. Cara ini dilakukan dengan harapan mampu menekan tingginya pengangguran di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan pernyataan di atas, diperlukan beberapa variabel bebas yang digunakan sebagai penentu variabel apa yang memengaruhi TPT di Provinsi Jawa Barat. Variabel yang akan digunakan adalah Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK). Untuk lebih jelasnya, variabel tersebut akan dijelaskan di kajian pustaka.

Berdasarkan data penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA), Kabupaten Karawang menjadi Kabupaten dengan penerimaan PMA tertinggi dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Tingginya angka investasi di Karawang berkaitan

dengan adanya program Pemerintah Pusat yang akan membangun bandara internasional, kereta cepat, dan proyek skala nasional lainnya. Tidak hanya itu, Karawang telah ditetapkan sebagai kawasan industri manufaktur, sehingga memberi nilai tambah dimata investor asing untuk menanamkan modal di Kabupaten Karawang. Realisasi PMA Kabupaten Karawang hingga mencapai 21,324 triliun dengan total 1562 proyek di luar program yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data penerimaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Karawang menjadi kabupaten dengan PMDN tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sektor yang paling dilirik oleh investor adalah sektor transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, industri dan perkantoran, konstruksi, dan industri kendaraan bermotor. Realisasi PMDN hingga mencapai 2,297 triliun dengan 354 proyek. Berdasarkan hal itu, Provinsi Jawa Barat berhasil menempati peringkat tertinggi realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2019, yaitu sebesar 137,5 triliun (kompas.com).

Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Kabupaten Karawang merupakan kabupaten dengan nilai upah minimum tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu didapatkan rata-rata selama 8 tahun sebesar Rp 2.986.844. Sedangkan Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten dengan nilai upah minimum terendah yaitu sebesar Rp 902.124, dengan hitungan rata-rata selama 8 tahun. Terdapat peningkatan UMK setiap tahunnya di Kabupaten Karawang, hal ini diduga karena adanya ketakutan akan terjadi demo dari buruh di kabupaten setempat. Di sisi lain, ditakutkan bahwa pengusaha setempat akan relokasi ke wilayah lain atau bahkan gulung tikar, karena penetapan UMK yang tinggi. Beralih ke Kabupaten Pangandaran, meskipun menjadi kabupaten dengan rata-rata UMK terendah, tetapi setiap tahunnya terdapat peningkatan UMK. Hal ini dilakukan oleh pemerintah setempat

untuk menghindari kejadian di mana masyarakat tidak ingin bekerja di Pangandaran. Maka dari itu, pemerintah setempat meningkatkan UMK setiap tahunnya.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan telah dihitung sebelumnya, Kota Bandung menjadi kota dengan tingkat IPM tertinggi yang diperoleh dari rata-rata selama 8 tahun yaitu sebesar 79,83% dan Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten dengan tingkat IPM terendah yaitu sebesar 57,96%. Kota Sukabumi menjadi kota dengan IPM tertinggi karena komponen dalam pembentuk IMP turut mengalami peningkatan, seperti anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun dan pengeluaran per kapita masyarakat telah mencapai Rp 11,2 juta khususnya pada tahun 2019. Sedangkan, Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten dengan IPM terendah karena pada tahun 2012 belum menjadi suatu kabupaten, sehingga belum ada perhitungan IPM pada tahun tersebut. Meskipun demikian, IPM di Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2012-2019.

Berdasarkan latar belakang dan variabel bebas yang telah ditulis, peneliti akan menganalisa sejauh mana pengaruh dari PMA, PMDN, IPM, dan UMP dalam memengaruhi TPT di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2019. di mana penelitian ini berjudul, “Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019”

## **4.2 Hasil Pengolahan Data**

Data pada penelitian ini diperoleh dari publikasi situs resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Barat yaitu [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id), Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu [nswi.bkpm.go.id](http://nswi.bkpm.go.id), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat yaitu [disnakertrans.jabarprov.go.id](http://disnakertrans.jabarprov.go.id), dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari berbagai sumber yang telah disebutkan, penulis mengambil data dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Sebanyak 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menjadi sampel pada penelitian ini.

## **4.3 Analisis Statistik Deskriptif**

Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif didapatkan gambaran terkait data penelitian secara jelas. Penjabaran analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dijabarkan melalui mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel dalam model penelitian. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). TPT sebagai variabel independen sedangkan PMA, PMDN, IPM, dan UMK sebagai variabel independen.

Hasil pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 dan pada penelitian ini didapatkan jumlah observasi sebanyak 216 sampel. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki rata-rata (mean) sebesar 9,09875 dan nilai tengah (median) sebesar 9,335000. Nilai tertinggi pada TPT sebesar 10,01000 sedangkan nilai terendah pada TPT adalah sebesar 7,65000. Persebaran data yang ditunjukkan dalam nilai standar deviasi adalah sebesar 0,833563. Besarnya nilai standar deviasi pada TPT lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPT memiliki data yang tidak tersebar.

Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki rata-rata (mean) sebesar 3,100375 dan nilai median sebesar 2,888000. Nilai tertinggi pada PMA sebesar 5,122000 sedangkan nilai terendah pada PMA adalah 0,927000. Persebaran data yang ditunjukkan dalam nilai standar deviasi adalah sebesar 1,473102. Besarnya nilai standar deviasi pada PMA lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMA memiliki data yang tidak tersebar.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki rata-rata (mean) sebesar 2,897125 dan nilai median sebesar 2,422000. Nilai tertinggi pada PMDN sebesar 6,828000 sedangkan nilai terendah pada PMDN adalah 0,955000. Persebaran data yang ditunjukkan dalam nilai standar deviasi adalah sebesar 1,828359. Besarnya nilai standar deviasi pada PMDN lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PMDN memiliki data yang tidak tersebar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki rata-rata (mean) sebesar 68,16483 dan nilai median sebesar 68,04349. Nilai tertinggi pada IPM sebesar 70,65000 sedangkan nilai terendah pada IPM adalah 65,66241. Persebaran data yang ditunjukkan dalam nilai standar deviasi adalah sebesar 1,526402. Besarnya nilai standar deviasi pada IPM lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki data yang tidak tersebar.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki rata-rata (mean) sebesar 2672899 dan nilai median sebesar 28077663. Nilai tertinggi pada UMK sebesar 3763405 sedangkan nilai terendah pada PMA adalah 1269320. Persebaran data yang ditunjukkan dalam nilai standar deviasi adalah sebesar 801970,8. Besarnya

nilai standar deviasi pada UMK lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki data yang tidak tersebar.

**Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Sampel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Deviasi
TPT	216	9,09875	9,335000	10,01000	7,65000	0,833563
PMA	216	3,100375	2,888000	5,122000	0,927000	1,473102
PMDN	216	2,897125	2,422000	6,828000	0,955000	1,828359
IPM	216	68,16483	68,04349	70,65000	65,66241	1,526402
UMK	216	2672899	28077663	3763405	1269320	801970,8
Sumber: Data di olah.						

#### 4.4 Hasil Analisis

##### 4.4.1 Pemilihan Model Data Panel

###### 4.4.1.1 Uji Chow

Metode ini digunakan untuk membandingkan model terbaik di antara dua model, yaitu Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitas dengan nilai alfa. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho: Common Effect Model (CEM)

Ha: Fixed Effect Model (FEM)

Setelah melakukan regresi dengan membandingkan antara model CEM dengan FEM didapatkan hasil probabilitas sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Regresi Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: UJI\_F

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.000000	(26,185)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	26	1.0000

Sumber: Hasil olah data pada Eviews 9.

Berdasarkan dari hasil uji chow, didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas F Test sebesar  $1.000 > 0,05$  (alpha) yang artinya gagal menolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini Common Effect Model (CEM).

#### 4.4.1.2 Lagrange Multiplier Test

Metode ini digunakan untuk membandingkan model terbaik di antara dua model, yaitu Common Effect Model (CEM) dengan Random Effect Model (REM). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitas dengan nilai alfa. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Common Effect Model (CEM)

$H_a$ : Random Effect Model (REM)

Setelah melakukan regresi dengan membandingkan antara model CEM dengan REM didapatkan hasil probabilitas sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Regresi Lagrange Multiplier Test**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15.42857	2808.000	2823.429
	(0.0001)	(0.0000)	(0.0000)

Sumber: Hasil olah data pada eviews 9.

Berdasarkan dari hasil Lagrange Multiplier Test, didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar  $0,0001 < 0,05$  (alpha) yang artinya menolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini Random Effect Model (REM).

#### 4.4.1.3 Uji Hausman

Metode ini digunakan untuk membandingkan model terbaik di antara dua model, yaitu Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai hasil probabilitas dengan nilai alfa. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Random Effect Model (REM)

$H_a$ : Fixed Effect Model (FEM)

Setelah melakukan regresi dengan membandingkan antara model REM dengan FEM didapatkan hasil probabilitas sebagai berikut:



**Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: UJI\_HAUSMAN

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber: hasil olah data pada Eviews 9.

Didapatkan nilai cross-section random sebesar  $1,000 > 0,05$  (alpha) yang artinya gagal menolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam uji regresi panel ini Random Effect Model (REM).

Berdasarkan tiga langkah pengujian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk analisis regresi yaitu Random Effect Model (REM).

#### 4.4.2 Estimasi Random Effect Model (REM)

Model Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan antar individu data yang di akomodasi dari perbedaan intersep. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Hasil Model Random Effect Model (REM)**

Dependent Variable: TPT

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/30/21 Time: 17:37

Sample: 2012 2019

Periods included: 8

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 216

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-62.78132	12.67123	-4.954634	0.0000
PMA	0.799464	0.053477	14.94972	0.0000
PMDN	0.518156	0.032860	15.76848	0.0000
IPM	1.128231	0.201232	5.606629	0.0000
UMK	-3.37E-06	4.74E-07	-7.105627	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.411161	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.790647	Mean dependent var		9.098750
Adjusted R-squared	0.786678	S.D. dependent var		0.833563
S.E. of regression	0.384996	Sum squared resid		31.27489
F-statistic	199.2162	Durbin-Watson stat		2.962779
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.790647	Mean dependent var		9.098750
Sum squared resid	31.27489	Durbin-Watson stat		2.962779

$$Y_{it} = -62.78132 + 0.799464 X_{1it} + 0.518156 X_{2it} + 1.128231 X_{3it} - 3.38 X_{4it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat (dalam persen).

X1 = Koefisien pengaruh x1. Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat (dalam miliar rupiah).

X2 = Koefisien pengaruh x2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat (dalam miliar rupiah).

X3 = Koefisien pengaruh x3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat (dalam persen).

X4 = Koefisien pengaruh x4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat (dalam juta rupiah).

#### 4.4.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  yang dihasilkan dari estimasi dengan menggunakan metode Random Effect Model (REM) adalah sebesar 0.790647. Hal ini menunjukkan bahwa variasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat sebesar 79% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dipilih, yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sedangkan sisanya sebesar 21% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar variabel model yang digunakan.

#### 4.4.3 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat memengaruhi variabel dependen yang ada atau tidak. Pada

estimasi Uji F, didapatkan nilai F hitung sebesar 199.2162 dengan nilai probabilitas F hitung sebesar 0.000000. Dari hasil Uji F dapat disimpulkan bahwa dengan  $\alpha = 0,05$ , F hitung menolak  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen yang ada yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat secara signifikan.

#### 4.4.4 Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dari hasil estimasi yang telah dilakukan didapatkan bahwa:

1. Variabel X1 Penanaman Modal Asing (PMA)

Didapatkan nilai probabilitas X1 sebesar  $0.0000 < 0.05$  ( $\alpha$ ) yang artinya menolak  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa variabel X1 (PMA) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (TPT).

2. Variabel X2 Penanaman Dalam Negeri (PMDN)

Didapatkan nilai probabilitas X2 sebesar  $0.0000 < 0.05$  ( $\alpha$ ) yang artinya menolak  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa variabel X2 (PMDN) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (TPT).

3. Variabel X3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Didapatkan nilai probabilitas X3 sebesar  $0.0000 < 0.05$  ( $\alpha$ ) yang artinya menolak  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa variabel X3 (IPM) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (TPT).

#### 4. Variabel X4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Didapatkan nilai probabilitas X4 sebesar  $0.0000 < 0.05$  (alpha) yang artinya menolak  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa variabel X4 (UMK) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (TPT)

### 4.5 Interpretasi Hasil

Pada interpretasi hasil menjelaskan hubungan masing-masing variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel dependen (Y), yang dilihat dari setiap nilai koefisiennya. Adapun hasil dari estimasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Koefisien Variabel X1 (PMA)

Koefisien variabel X1 menunjukkan hasil estimasi sebesar 0.799464 dengan probabilitas uji t sebesar 0.0000 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (TPT). Dengan nilai 0.799464 berarti bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Ketika PMA mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka TPT akan meningkat sebesar 0.799%. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu apabila terjadi penurunan PMA sebesar satu satuan maka akan berdampak pada turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,99%.

#### 2. Koefisien Variabel X2 (PMDN)

Koefisien variabel X2 menunjukkan hasil estimasi sebesar 0.518156 dengan probabilitas uji t sebesar 0.0000 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (TPT). Dengan nilai 0.518156 berarti bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Ketika PMDN mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka TPT akan meningkat sebesar 0.5181%. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu apabila terjadi penurunan PMDN sebesar

satu satuan maka akan berdampak pada turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,1%.

3. Koefisien Variabel X3 (IPM)

Koefisien variabel X3 menunjukkan hasil estimasi sebesar 1.128231 dengan probabilitas uji t sebesar 0.0000 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (TPT). Dengan nilai 1.128231 berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Ketika IPM mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka TPT akan meningkat sebesar 1.128%. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu apabila terjadi penurunan IPM sebesar satu satuan maka akan berdampak pada turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 11,2%.

4. Koefisien Variabel X4 (UMK)

Koefisien variabel X4 menunjukkan hasil estimasi sebesar -3,38 dengan probabilitas uji t sebesar 0.0000 yang berarti signifikan terhadap variabel Y (TPT). Dengan nilai -3,38 berarti bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y. Ketika UMK mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka TPT akan menurun sebesar 3.38%. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu apabila terjadi penurunan UMK sebesar satu satuan maka akan berdampak pada naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,38%.

#### **4.6 Analisis Ekonomi**

##### **4.6.1 Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Didapatkan nilai koefisien variabel PMA sebesar 0,799464 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti positif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa PMA berpengaruh

terhadap TPT. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reni Helvira dan Endah Putria Rizki (2020) yang mengatakan bahwa investasi berpengaruh positif dengan TPT. Alasan yang mendukung hasil penelitian ini adalah investor asing lebih tertarik untuk menanamkan modal pada sektor padat modal dibandingkan pada sektor padat karya.

#### **4.6.2 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Didapatkan nilai koefisien variabel PMDN sebesar 0,518156 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti positif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa PMDN berpengaruh negatif terhadap TPT. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Elvana Astrid dan Soeharjoto Soekapdjo yang mengatakan bahwa dana PMDN yang digelontorkan lebih banyak pada sektor padat modal dibandingkan pada sektor padat karya, sehingga tidak memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

#### **4.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap (IPM) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Didapatkan nilai koefisien variabel IPM sebesar 1,128231 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti positif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap TPT. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan dan pendidikan tidak serta merta dapat meningkatkan produktivitas sehingga apabila setiap kenaikan IPM maka TPT akan meningkat pula. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi akibat karena investasi yang dilakukan melalui PMA dan PMDN tidak maksimal pada sektor padat karya sehingga peningkatan IPM tidak diikuti oleh penurunan TPT.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suaidah (2013), yang mengatakan bahwa pendidikan berhubungan positif dengan tingkat pengangguran. di mana dalam hal ini pendidikan menjadi salah satu cakupan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya semakin lama seseorang menempuh pendidikan maka tingkat pengangguran akan bertambah. Karena ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan cenderung mencari pekerjaan di luar daerah. Hal ini terjadi seseorang tersebut akan lebih kompetitif terlebih pada daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang diminati oleh seseorang tersebut.

#### **4.6.4 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Didapatkan nilai koefisien UMK sebesar -3,38 dengan nilai probabilitas 0,0000 yang berarti negatif dan signifikan terhadap TPT. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap TPT. Hal ini berarti bahwa apabila UMK meningkat maka TPT akan menurun, begitupun sebaliknya. Apabila UMK menurun maka TPT akan meningkat.

Menurut Wijaya (2014), hasil yang didapatkan pada penelitian ini sesuai dengan teori model dua sektor yang menyatakan bahwa adanya penurunan tingkat pengangguran disebabkan oleh kebijakan UMK yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor formal berkurang sehingga masyarakat memilih untuk pindah ke sektor informal. Ketika masyarakat memilih untuk pindah ke sektor informal maka mereka tetap memiliki pekerjaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada BAB IV telah didapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian memberikan bukti bahwa apabila semakin tinggi PMA yang diinvestasikan maka TPT akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Apabila semakin rendah PMA yang di investasikan maka TPT akan menurun.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian memberikan bukti bahwa apabila semakin tinggi PMDN yang diinvestasikan maka TPT akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Apabila semakin rendah PMDN yang diinvestasikan maka TPT akan menurun.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian memberikan bukti bahwa apabila semakin tinggi tingkat IPM maka TPT akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Apabila tingkat IPM semakin rendah maka TPT akan menurun.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian memberikan bukti bahwa apabila semakin tinggi UMK pada suatu daerah maka TPT akan menurun, begitupun sebaliknya. Apabila tingkat IPM semakin rendah maka TPT akan meningkat.

## 5.2 Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini terjadi karena adanya alokasi dana investasi yang tidak seimbang antara sektor padat modal dengan sektor padat karya. Apabila pemerintah setempat masih lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, maka terjadi ketidakseimbangan pada dana alokasi dana penanaman modal asing. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini, pemerintah setempat sebaiknya melakukan evaluasi apakah penanaman modal pada sektor padat modal sudah cukup sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.
2. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. PMDN dilakukan paling banyak ada pada sektor konstruksi. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, seperti perbaikan jalan raya. Maka dari itu penanaman modal yang dilakukan tidak cukup menekan jumlah tingkat pengangguran terbuka, justru yang terjadi malah kebalikannya. Semakin besar jumlah penanaman modal dalam negeri yang disalurkan justru turut menambah persentase tingkat pengangguran terbuka.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan dan pendidikan tidak serta merta meningkatkan produktifitas seorang individu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk lebih memperhatikan pembangunan manusia melalui peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

4. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat. Hal ini terjadi karena apabila upah yang ditawarkan pemberi kerja tinggi maka banyak tenaga kerja yang bersedia bekerja karena upahnya dianggap tinggi bahkan cukup untuk sehari-sehari. Sehingga tingginya penetapan UMK mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.



## REFERENSI

- Astrid, E., & Soekapdjo, S. (2020). *pengangguran di indonesia Inflation , total of population , HDI , FDI , and DDI influence to unemployment in Indonesia*. 22(2), 319–325.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. “*Pengertian IPM*”.  
<https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Firdaus, D. W., & Widnyasastrena, D. (2016). Kajian Pertumbuhan Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 895-910.
- Harjono, D. K. (2012). *Hukum Penanaman Modal; Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. 25, 265.
- Hartanto, T. B., & Masjkuri, S. U. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 21–30.  
<https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5502>
- Head, J. W. (1993). Supranational law: how the move toward multilateral solutions is changing the character of international law. *U. Kan. L. Rev.*, 42, 605.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (2000). *The Economics Of Labor Markets*.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN*. 9(1).
- Muhdar, H. M. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dankemiskinan di

- Indonesia: Masalah Dan Solusi. *Al-Buhuts*, 11(1), 42–66.
- Nurhidayah. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007-2016*.
- Putro, A. S., & Setiawan, A. H. (2013). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungannya Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 1–14.
- Sadono, S. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Salim, B. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soleha, S. (2016). Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 2016.
- Suaidah, I. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Tarsito, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Analisis Deskriptif

	TPT	PMA	PMDN	IPM	UMK
Mean	9.098750	3.100375	2.897125	68.16483	2672899.
Median	9.335000	2.888000	2.422000	68.04349	2807663.
Maximum	10.01000	5.122000	6.828000	70.65000	3763405.
Minimum	7.650000	0.927000	0.955000	65.66241	1269320.
Std. Dev.	0.833563	1.473102	1.828359	1.526402	801970.8
Skewness	-0.750881	0.069862	0.968229	0.023557	-0.364990
Kurtosis	2.041267	1.546730	3.040778	2.049222	1.957114
Jarque-Bera	28.57012	19.18365	33.76378	8.155794	14.58435
Probability	0.000001	0.000068	0.000000	0.016943	0.000681
Sum	1965.330	669.6810	625.7790	14723.60	5.77E+08
Sum Sq. Dev.	149.3880	466.5565	718.7226	500.9289	1.38E+14
Observations	216	216	216	216	216

Sumber: hasil olah data pada Eviews 9 (2020)

## Lampiran 2: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: UJI\_F

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.000000	(26,185)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	26	1.0000

Sumber: Hasil olah data pada Eviews 9.

## Lampiran 3: Hasil Regresi Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15.42857 (0.0001)	2808.000 (0.0000)	2823.429 (0.0000)

Sumber: Hasil olah data pada eviews 9.

## Lampiran 4: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: UJI\_HAUSMAN

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber: Hasil olah data pada eviews 9.

## Lampiran 5: Hasil Model Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: TPT

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/30/21 Time: 17:37

Sample: 2012 2019

Periods included: 8

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 216

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-62.78132	12.67123	-4.954634	0.0000
PMA	0.799464	0.053477	14.94972	0.0000
PMDN	0.518156	0.032860	15.76848	0.0000
IPM	1.128231	0.201232	5.606629	0.0000



UMK	-3.37E-06	4.74E-07	-7.105627	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.411161	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.790647	Mean dependent var	9.098750	
Adjusted R-squared	0.786678	S.D. dependent var	0.833563	
S.E. of regression	0.384996	Sum squared resid	31.27489	
F-statistic	199.2162	Durbin-Watson stat	2.962779	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.790647	Mean dependent var	9.098750	
Sum squared resid	31.27489	Durbin-Watson stat	2.962779	

Sumber: Hasil olah data pada eviews 9.

Lampiran 6: Data Penelitian

KOTA	TAHUN	TPT	PMA	PMDN
Bogor	2012	9.12	1.743	0.955
Bogor	2013	7.87	0.927	1.03
Bogor	2014	7.65	2.343	1.754
Bogor	2015	10.01	2.022	6.828
Bogor	2016	9.78	5.122	2.707
Bogor	2017	9.55	4.258	2.137
Bogor	2018	9.75	4.955	3.733
Bogor	2019	9.06	3.433	4.033
Sukabumi	2012	9.51	0.288	0.129
Sukabumi	2013	10.38	0.806	0.149
Sukabumi	2014	8.09	2.702	7.16
Sukabumi	2015	10.05	3.373	0.54
Sukabumi	2016	8.85	0.968	0.098
Sukabumi	2017	7.66	0.419	0.079
Sukabumi	2018	7.77	0.614	0.352
Sukabumi	2019	7.99	0.356	0.199
Cianjur	2012	10.73	0.9482	0.00
Cianjur	2013	14.18	0.1639	0.0204
Cianjur	2014	14.87	0.5727	0.0085
Cianjur	2015	10.06	0.2993	0.0834
Cianjur	2016	10.08	0.7253	0.8623
Cianjur	2017	10.10	0.4346	0.2467
Cianjur	2018	10.16	0.041	0.1433
Cianjur	2019	9.72	0.24	0.5072

Bandung	2012	11.61	0.212	0.168
Bandung	2013	10.12	0.588	0.337
Bandung	2014	8.48	0.648	0.201
Bandung	2015	4.03	0.617	0.44
Bandung	2016	3.97	0.436	0.425
Bandung	2017	3.92	0.596	2.561
Bandung	2018	5.00	0.377	2.758
Bandung	2019	5.48	2.883	0.319
Garut	2012	6.22	0.0049	0.00
Garut	2013	8.14	0.01	0.00
Garut	2014	7.71	0.12	0.012
Garut	2015	6.50	0.2008	0.037
Garut	2016	7.18	0.183	0.151
Garut	2017	7.86	0.183	1.938
Garut	2018	7.07	0.1705	0.116
Garut	2019	7.28	0.1071	0.392
Tasikmalaya	2012	7.12	0.05311	0.00
Tasikmalaya	2013	6.52	0.00	0.00
Tasikmalaya	2014	5.38	0.01006	0.00
Tasikmalaya	2015	5.46	0.04139	0.0018
Tasikmalaya	2016	7.56	0.005	0.00001
Tasikmalaya	2017	6.61	0.04864	0.00
Tasikmalaya	2018	6.83	0.07387	0.00
Tasikmalaya	2019	6.25	0.00	0.00
Ciamis	2012	4.97	0.01106	0.00
Ciamis	2013	5.85	0.00	0.0567

Ciamis	2014	4.92	0.00	0.00
Ciamis	2015	6.99	0.00	0.00
Ciamis	2016	6.08	0.00	0.00
Ciamis	2017	5.17	0.00081	0.0524
Ciamis	2018	4.60	0.00018	0.00007
Ciamis	2019	5.10	0.00	0.00
Kuningan	2012	6.81	0.0009	0.00
Kuningan	2013	8.22	0.00317	0.01298
Kuningan	2014	6.88	0.00809	0.00
Kuningan	2015	7.49	0.00267	0.00
Kuningan	2016	7.71	0.05945	0.00
Kuningan	2017	7.94	0.09882	0.05951
Kuningan	2018	8.99	0.06855	0.03474
Kuningan	2019	9.61	0.00	0.00353
Cirebon	2012	15.92	0.145	5.592
Cirebon	2013	14.88	0.142	0.051
Cirebon	2014	11.02	0.024	0.00
Cirebon	2015	10.51	0.43	0.323
Cirebon	2016	10.06	1.267	0.35
Cirebon	2017	9.61	4.576	0.323
Cirebon	2018	10.56	3.841	0.972
Cirebon	2019	10.28	4.54	0.026
Majalengka	2012	6.42	0.00	0.033
Majalengka	2013	7.35	0.212	0.00
Majalengka	2014	4.47	3.659	0.00
Majalengka	2015	4.01	1.48	0.00

Majalengka	2016	4.51	0.131	2.645
Majalengka	2017	5.02	0.95	4.327
Majalengka	2018	4.95	1.221	0.597
Majalengka	2019	4.37	0.304	0.00
Sumedang	2012	7.14	0.932	0.00
Sumedang	2013	6.41	0.0341	0.00
Sumedang	2014	7.51	0.2543	0.128
Sumedang	2015	9.00	0.1071	0.75
Sumedang	2016	8.07	0.2407	0.341
Sumedang	2017	7.15	0.2415	3.999
Sumedang	2018	7.52	0.1078	0.998
Sumedang	2019	7.63	0.0028	0.913
Indramayu	2012	7.60	0.034	0.0065
Indramayu	2013	9.63	0.128	0.0391
Indramayu	2014	8.01	1.64	0.0677
Indramayu	2015	8.51	0.838	0.0755
Indramayu	2016	8.57	0.016	0.0016
Indramayu	2017	8.64	0.317	0.068
Indramayu	2018	8.36	0.116	0.1109
Indramayu	2019	8.28	1.466	0.0136
Subang	2012	7.59	0.148	0.08
Subang	2013	7.34	0.69	0.297
Subang	2014	6.74	3.97	0.00
Subang	2015	10.04	2.975	0.143
Subang	2016	9.39	0.841	0.067
Subang	2017	8.74	1.013	0.178

Subang	2018	8.65	1.025	0.519
Subang	2019	8.59	0.417	1.102
Purwakarta	2012	9.19	3.108	0.08
Purwakarta	2013	9.45	4.974	0.499
Purwakarta	2014	7.83	3.321	0.325
Purwakarta	2015	10.00	2.264	0.417
Purwakarta	2016	9.55	2.218	1.749
Purwakarta	2017	9.11	2.105	1.967
Purwakarta	2018	9.89	5.829	0.344
Purwakarta	2019	9.65	3.977	0.765
Karawang	2012	11.23	6.81	0.322
Karawang	2013	9.80	29.44	2.077
Karawang	2014	11.10	15.59	1.775
Karawang	2015	11.51	14	6.164
Karawang	2016	10.53	17.77	5.652
Karawang	2017	9.55	20.63	8.362
Karawang	2018	9.05	11.64	3.2
Karawang	2019	9.61	15.13	2.182
Bekasi	2012	7.92	15.26	0.99
Bekasi	2013	7.17	14.77	1.98
Bekasi	2014	6.79	17.71	3.62
Bekasi	2015	10.03	22.3	4.79
Bekasi	2016	10.50	41.37	7.44
Bekasi	2017	10.97	26.44	6.18
Bekasi	2018	9.69	39.06	15.00
Bekasi	2019	8.94	21.23	15.64

Bandung Barat	2012	9.99	0.048	0.0338
Bandung Barat	2013	9.54	0.149	0.106
Bandung Barat	2014	8.15	0.448	0.0231
Bandung Barat	2015	10.01	0.075	0.1743
Bandung Barat	2016	9.67	0.136	0.8356
Bandung Barat	2017	9.33	0.824	0.2015
Bandung Barat	2018	8.50	0.77	0.0437
Bandung Barat	2019	8.17	3.463	0.0096
Pangandaran	2012	0.00	0.00	0.00
Pangandaran	2013	0.00	0.00	0.00
Pangandaran	2014	0.00	0.00	0.00
Pangandaran	2015	4.81	0.00	0.00
Pangandaran	2016	4.07	0.00	0.00
Pangandaran	2017	3.34	0.00	0.00
Pangandaran	2018	3.58	0.01206	0.0155
Pangandaran	2019	4.48	0.0001	0.00
Bogor	2012	9.50	0.014	0.001
Bogor	2013	9.80	0.0372	0.00
Bogor	2014	9.48	0.1469	0.00
Bogor	2015	11.08	0.2519	0.005
Bogor	2016	10.32	0.4556	0.26
Bogor	2017	9.57	0.249	4.938
Bogor	2018	9.65	0.2725	2.831
Bogor	2019	9.10	0.0223	1.334
Sukabumi	2012	11.85	0.00	0.00
Sukabumi	2013	11.18	0.0096	0.01203

Sukabumi	2014	8.09	2.702	7.16
Sukabumi	2015	10.05	3.373	0.54
Sukabumi	2016	8.53	0.0109	0.00
Sukabumi	2017	8.00	0.00	0.00169
Sukabumi	2018	8.48	0.0009	0.00
Sukabumi	2019	8.44	0.0111	0.03556
Bandung	2012	9.27	0.965	2.514
Bandung	2013	10.97	0.199	1.578
Bandung	2014	8.05	0.229	3.42
Bandung	2015	9.02	6.443	5.11
Bandung	2016	8.73	0.78	6.389
Bandung	2017	8.44	1.083	0.994
Bandung	2018	8.01	0.269	2.129
Bandung	2019	8.16	3.372	2.16
Cirebon	2012	12.71	0.0497	0.00
Cirebon	2013	9.02	0.0234	0.00
Cirebon	2014	11.02	0.024	0.00
Cirebon	2015	11.28	0.1542	0.00
Cirebon	2016	10.28	0.1927	0.0307
Cirebon	2017	9.29	0.2596	0.5321
Cirebon	2018	9.06	0.0389	0.0024
Cirebon	2019	8.98	0.0045	0.00
Bekasi	2012	8.88	0.657	0.289
Bekasi	2013	9.50	0.954	0.124
Bekasi	2014	9.36	0.228	0.158
Bekasi	2015	9.36	0.652	0.081



Bekasi	2016	9.34	1.468	0.081
Bekasi	2017	9.32	2.641	1.192
Bekasi	2018	9.07	3.698	2.675
Bekasi	2019	8.23	2.81	3.534
Depok	2012	9.55	0.183	0.00
Depok	2013	7.69	0.283	0.043
Depok	2014	8.44	0.602	0.022
Depok	2015	7.48	0.525	0.013
Depok	2016	7.24	0.483	0.23
Depok	2017	7.00	1.106	0.063
Depok	2018	6.64	0.463	1.264
Depok	2019	6.11	1.627	1.891
Cimahi	2012	8.67	0.136	0.224
Cimahi	2013	11.43	0	0.594
Cimahi	2014	9.62	0	0.002
Cimahi	2015	9.00	0.022	0.265
Cimahi	2016	8.71	0.075	1.013
Cimahi	2017	8.43	0.313	0.053
Cimahi	2018	7.93	0.03	0.145
Cimahi	2019	8.08	1.034	0.092
Tasikmalaya	2012	7.12	0.05311	0.00
Tasikmalaya	2013	6.52	0.00	0.00
Tasikmalaya	2014	5.38	0.01006	0.00
Tasikmalaya	2015	5.46	0.04139	0.0018
Tasikmalaya	2016	6.17	0.00881	0.1153
Tasikmalaya	2017	6.89	0.00	0.0436

Tasikmalaya	2018	6.85	0.00	0.0017
Tasikmalaya	2019	6.75	0.00	0.00
Banjar	2012	6.20	0.00	0.00
Banjar	2013	7.04	0.00	0.00
Banjar	2014	7.38	0.00	0.00
Banjar	2015	7.38	0.00	0.00
Banjar	2016	6.67	0.00	0.00
Banjar	2017	5.97	0.00	0.00
Banjar	2018	5.89	0.00	0.00
Banjar	2019	6.10	0.00	0.00

KOTA	TAHUN	TPT	IPM	UMK
Bogor	2012	9.12	65.66	1269320
Bogor	2013	7.87	66.74	1804684
Bogor	2014	7.65	67.36	2242240
Bogor	2015	10.01	67.77	2655000
Bogor	2016	9.78	68.32	2960325
Bogor	2017	9.55	69.13	3204552
Bogor	2018	9.75	69.69	3483668
Bogor	2019	9.06	70.65	3763405
Sukabumi	2012	9.51	62.27	885000
Sukabumi	2013	10.38	63.63	1565922
Sukabumi	2014	8.09	64.07	1565922
Sukabumi	2015	10.05	64.44	1969000
Sukabumi	2016	8.85	65.13	2195435
Sukabumi	2017	7.66	65.49	2376558

Sukabumi	2018	7.77	66.05	2583557
Sukabumi	2019	7.99	66.87	2791016
Cianjur	2012	10.73	60.28	876500
Cianjur	2013	14.18	61.68	1139409
Cianjur	2014	14.87	62.08	150000
Cianjur	2015	10.06	62.42	1648000
Cianjur	2016	10.08	62.92	1837520
Cianjur	2017	10.10	63.70	1989115
Cianjur	2018	10.16	64.62	2162367
Cianjur	2019	9.72	65.38	2336004
Bandung	2012	11.61	68.13	1223800
Bandung	2013	10.12	68.58	1565008
Bandung	2014	8.48	69.06	1735473
Bandung	2015	4.03	70.05	2041000
Bandung	2016	3.97	70.69	2275715
Bandung	2017	3.92	71.02	2463461
Bandung	2018	5.00	71.75	2678029
Bandung	2019	5.48	72.41	2893074
Garut	2012	6.22	61.04	880000
Garut	2013	8.14	61.67	1144691
Garut	2014	7.71	62.23	1085000
Garut	2015	6.50	63.21	1275000
Garut	2016	7.18	63.64	1421625
Garut	2017	7.86	64.52	1538909
Garut	2018	7.07	65.42	1672948
Garut	2019	7.28	66.22	1807285

Tasikmalaya	2012	7.12	67.84	946000
Tasikmalaya	2013	6.52	68.63	1232086
Tasikmalaya	2014	5.38	69.04	1279329
Tasikmalaya	2015	5.46	69.99	1472000
Tasikmalaya	2016	7.56	63.57	1632360
Tasikmalaya	2017	6.61	64.14	1767030
Tasikmalaya	2018	6.83	65.00	1920938
Tasikmalaya	2019	6.25	65.64	2075189
Ciamis	2012	4.97	66.29	793750
Ciamis	2013	5.85	67.20	1182873
Ciamis	2014	4.92	67.64	1040928
Ciamis	2015	6.99	68.02	1177000
Ciamis	2016	6.08	68.45	1363319
Ciamis	2017	5.17	68.87	1475793
Ciamis	2018	4.60	69.63	1604334
Ciamis	2019	5.10	70.39	1733162
Kuningan	2012	6.81	65.60	805000
Kuningan	2013	8.22	66.16	1142130
Kuningan	2014	6.88	66.63	1002000
Kuningan	2015	7.49	67.19	1224000
Kuningan	2016	7.71	67.51	1364764
Kuningan	2017	7.94	67.78	1477353
Kuningan	2018	8.99	68.55	1606030
Kuningan	2019	9.61	69.12	1734994
Cirebon	2012	15.92	64.48	956650
Cirebon	2013	14.88	65.06	1212619

Cirebon	2014	11.02	72.93	1226500
Cirebon	2015	10.51	66.07	1428000
Cirebon	2016	10.06	66.70	1592220
Cirebon	2017	9.61	67.39	1723578
Cirebon	2018	10.56	68.05	1873702
Cirebon	2019	10.28	68.69	2024160
Majalengka	2012	6.42	63.13	994864
Majalengka	2013	7.35	63.71	1130975
Majalengka	2014	4.47	64.07	1000000
Majalengka	2015	4.01	64.75	1264000
Majalengka	2016	4.51	65.25	1409360
Majalengka	2017	5.02	65.92	1525632
Majalengka	2018	4.95	66.72	1658515
Majalengka	2019	4.37	67.52	1791693
Sumedang	2012	7.14	67.36	1240000
Sumedang	2013	6.41	68.47	1545515
Sumedang	2014	7.51	68.76	1735473
Sumedang	2015	9.00	69.29	2041000
Sumedang	2016	8.07	69.45	2275715
Sumedang	2017	7.15	70.07	2463461
Sumedang	2018	7.52	70.99	2678029
Sumedang	2019	7.63	71.46	2893074
Indramayu	2012	7.60	62.09	994864
Indramayu	2013	9.63	62.98	1317614
Indramayu	2014	8.01	63.55	1276320
Indramayu	2015	8.51	64.36	1494000

Indramayu	2016	8.57	64.78	1665810
Indramayu	2017	8.64	65.58	1803239
Indramayu	2018	8.36	66.36	1960301
Indramayu	2019	8.28	66.97	2117713
Subang	2012	7.59	64.86	862500
Subang	2013	7.34	65.48	1577959
Subang	2014	6.74	65.80	1577959
Subang	2015	10.04	66.52	1928000
Subang	2016	9.39	67.14	2149720
Subang	2017	8.74	67.73	2327072
Subang	2018	8.65	68.31	2529760
Subang	2019	8.59	68.69	2732899
Purwakarta	2012	9.19	66.30	1047500
Purwakarta	2013	9.45	67.09	1815121
Purwakarta	2014	7.83	67.32	2000000
Purwakarta	2015	10.00	67.84	2626000
Purwakarta	2016	9.55	68.56	2927990
Purwakarta	2017	9.11	69.28	3169549
Purwakarta	2018	9.89	69.98	3335617
Purwakarta	2019	9.65	70.67	3722299
Karawang	2012	11.23	65.97	1269227
Karawang	2013	9.80	66.61	2102000
Karawang	2014	11.10	67.08	2447450
Karawang	2015	11.51	67.66	2987000
Karawang	2016	10.53	68.19	3330505
Karawang	2017	9.55	69.17	3605272

Karawang	2018	9.05	69.89	3919291
Karawang	2019	9.61	70.86	4234010
Bekasi	2012	7.92	69.38	1491866
Bekasi	2013	7.17	70.09	2101374
Bekasi	2014	6.79	70.51	2447445
Bekasi	2015	10.03	71.19	2925000
Bekasi	2016	10.50	71.83	3261375
Bekasi	2017	10.97	72.63	3530438
Bekasi	2018	9.69	73.49	3915354
Bekasi	2019	8.94	73.99	4146126
Bandung Barat	2012	9.99	63.17	1236991
Bandung Barat	2013	9.54	63.93	1646475
Bandung Barat	2014	8.15	64.27	1738476
Bandung Barat	2015	10.01	65.23	2045000
Bandung Barat	2016	9.67	65.81	2280175
Bandung Barat	2017	9.33	66.63	2468289
Bandung Barat	2018	8.50	67.46	2683277
Bandung Barat	2019	8.17	68.27	2898744
Pangandaran	2012	0.00	0.00	0
Pangandaran	2013	0.00	64.73	0
Pangandaran	2014	0.00	65.29	0
Pangandaran	2015	4.81	65.62	1188000
Pangandaran	2016	4.07	65.79	1321620
Pangandaran	2017	3.34	66.60	1433901
Pangandaran	2018	3.58	67.44	1558794
Pangandaran	2019	4.48	68.21	1714673

Bogor	2012	9.50	72.25	1174200
Bogor	2013	9.80	72.86	1751290
Bogor	2014	9.48	73.10	2352350
Bogor	2015	11.08	73.65	2711000
Bogor	2016	10.32	74.50	3022765
Bogor	2017	9.57	75.16	3272143
Bogor	2018	9.65	75.66	3557147
Bogor	2019	9.10	76.23	3842785
Sukabumi	2012	11.85	69.74	890000
Sukabumi	2013	11.18	70.81	1288906
Sukabumi	2014	8.09	64.07	1565922
Sukabumi	2015	10.05	64.44	1969000
Sukabumi	2016	8.53	72.33	2195435
Sukabumi	2017	8.00	73.03	1985494
Sukabumi	2018	8.48	73.55	2158431
Sukabumi	2019	8.44	74.31	2331752
Bandung	2012	9.27	78.30	1271625
Bandung	2013	10.97	78.55	1811375
Bandung	2014	8.05	78.98	2000000
Bandung	2015	9.02	79.67	2356000
Bandung	2016	8.73	80.13	2626940
Bandung	2017	8.44	80.31	2843663
Bandung	2018	8.01	81.06	3091346
Bandung	2019	8.16	81.62	3339580
Cirebon	2012	12.71	71.97	980000
Cirebon	2013	9.02	72.27	1226016



Cirebon	2014	11.02	72.93	1226500
Cirebon	2015	11.28	73.34	1443000
Cirebon	2016	10.28	73.70	1608945
Cirebon	2017	9.29	74.00	1741683
Cirebon	2018	9.06	74.35	1893384
Cirebon	2019	8.98	74.92	2045422
Bekasi	2012	8.88	77.71	1422252
Bekasi	2013	9.50	78.63	1961667
Bekasi	2014	9.36	78.84	2441954
Bekasi	2015	9.36	79.63	2984000
Bekasi	2016	9.34	79.95	3327160
Bekasi	2017	9.32	80.30	3601650
Bekasi	2018	9.07	81.04	3915354
Bekasi	2019	8.23	81.59	4229756
Depok	2012	9.55	77.28	1424797
Depok	2013	7.69	78.27	2169859
Depok	2014	8.44	78.58	2397000
Depok	2015	7.48	79.11	2732000
Depok	2016	7.24	79.60	3046180
Depok	2017	7.00	79.83	3927489
Depok	2018	6.64	80.29	3584700
Depok	2019	6.11	80.82	3872551
Cimahi	2012	8.67	74.99	1209442
Cimahi	2013	11.43	75.85	1569353
Cimahi	2014	9.62	76.06	1735473
Cimahi	2015	9.00	76.42	2041000

Cimahi	2016	8.71	76.69	2275715
Cimahi	2017	8.43	76.95	2463461
Cimahi	2018	7.93	77.56	2678028
Cimahi	2019	8.08	78.11	2893074
Tasikmalaya	2012	7.12	67.84	946000
Tasikmalaya	2013	6.52	68.63	1232086
Tasikmalaya	2014	5.38	69.04	1279329
Tasikmalaya	2015	5.46	69.99	1472000
Tasikmalaya	2016	6.17	70.58	1641280
Tasikmalaya	2017	6.89	71.51	1767030
Tasikmalaya	2018	6.85	72.03	1920938
Tasikmalaya	2019	6.75	72.84	2086529
Banjar	2012	6.20	67.53	780000
Banjar	2013	7.04	68.01	1094000
Banjar	2014	7.38	68.34	1025000
Banjar	2015	7.38	69.31	1191000
Banjar	2016	6.67	70.09	1327965
Banjar	2017	5.97	70.79	1437522
Banjar	2018	5.89	71.25	1562730
Banjar	2019	6.10	71.75	1688217